

PERGESERAN IDENTITAS ARAB SAUDI DAN PROLIFERASI TERORISME

Dina Yulianti, Panji Haryadi, Otong Sulaeman

**Universitas Padjadjaran, Bandung, Universitas Pasundan,
Bandung, Sekolah Tinggi Filsafat Islam Sadra, Jakarta**

dina14@unpad.ac.id

Abstract

This article seeks to answer the question how is the real role of Saudi Arabia in the proliferation of terrorism in the world and what is the cause of the changing behaviour of Saudi Arabia's foreign policy in the era of King Salman? By using the theory of constructivism (agent-structure relations) in foreign policy, the authors argue that Saudi Arabia as an agent perceives its identity in accordance with the pressure of the global economy and the massive criticism of the international community against her support for the extreme groups. Facing these two pressures, Saudi Arabia tries to shift its identity into a moderate state. But at the same time, the identity of being a Muslim world leader vis-a-vis Iran aggravates the Saudis to continue spreading of Wahhabism. Thus it can be concluded that Saudi Arabia has dualism of identity in order to achieve polarity of its national interests.

Keywords: Identity, constructivism, foreign policy, terrorism

Abstrak

Artikel ini berupaya menjawab pertanyaan bagaimana peran Arab Saudi dalam proliferasi terorisme di dunia dan apa penyebab perubahan kebijakan luar negeri Arab Saudi di era Raja Salman? Dengan menggunakan teori konstruktivisme (hubungan agen-struktur) dalam kebijakan luar negeri, penulis berpendapat bahwa Arab Saudi sebagai agen memandang identitasnya sesuai dengan tekanan ekonomi global dan kritik besar-besaran dari komunitas internasional atas dukungannya terhadap kelompok ekstrim. Menghadapi dua tekanan struktural ini, Arab Saudi mencoba mengubah identitasnya menjadi negara moderat. Tetapi pada saat yang sama, identitas sebagai pemimpin Dunia Islam vis-a-vis Iran mendorong Saudi untuk terus menyebarkan Wahhabisme. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Arab Saudi memiliki dualisme identitas untuk mencapai dua kutub kepentingan nasionalnya.

Kata Kunci: Identitas, kebijakan luar negeri, konstruktivisme, terorisme

Pendahuluan

Arab Saudi banyak disebut-sebut sebagai sebuah negara yang menjadi sponsor utama terorisme. Hampir semua kelompok teror kontemporer, mulai Al Qaida dan berbagai organisasi derivasinya, hingga ISIS dan berbagai organisasi yang berafiliasi dengannya, menganut ideologi Wahhabisme yang dikembangkan dan disebarkan oleh Arab Saudi (Amstrong, 2014; European Parliament, 2013:5; Bahgat, 2004:53).

Menurut laporan dari Kementerian Dalam Negeri AS, sejak invasi Uni Soviet ke Afghanistan, Arab Saudi dan pihak-pihak yang berbasis di Saudi, seperti pengusaha kaya, bankir, dan organisasi derma, telah memberikan dana bantuan dan penyediaan kepada komunitas-komunitas Muslim yang terdampak konflik. Dana itu sebagian diberikan untuk membangun sekolah dan fasilitas ibadah; dan sebagian lainnya dialihkan kepada organisasi-organisasi radikal seperti Al Qaeda, jaringan Haqqani, dan Jemaah Islamiyah (European Parliament, 2013: 5). Dalam laporan Henry Jackson Society (Irish Times, 2017) disebutkan bahwa Arab Saudi sejak tahun 1960-an telah mendanai upaya penyebaran Wahhabisme ke seluruh Dunia Islam dan komunitas Muslim di Barat. Khusus di Inggris, menurut laporan itu, dana digunakan untuk mendirikan masjid dan pusat pendidikan Islam yang menjadi tempat aktivitas pendakwah ekstrim dan penyebaran literatur ekstrim. Selain itu, sekolah-sekolah Islam di Inggris juga menggunakan buku-buku teks dari Saudi.

Sejak beberapa tahun terakhir, terutama dalam era pemerintahan Raja Salman, Arab Saudi secara aktif membuat bantahan atas narasi 'Saudi mendanai ekstrimisme dan terorisme'. Kementerian Luar Negeri Arab Saudi pada tahun 2017 merilis dokumen *White Paper: Saudi Arabia and Counter terrorism* yang berisi sanggahan atas tuduhan bahwa Saudi mensponsori terorisme; antara lain dengan menyatakan bahwa Arab Saudi adalah target utama ISIS dan kelompok teror lainnya (pada periode Januari-Mei 2017 terjadi 4 kali insiden

yang melibatkan ISIS, yang menewaskan sejumlah anggota ISIS maupun polisi Saudi dan warga sipil) dan bahwa Saudi adalah salah satu negara yang terdepan dalam melawan terorisme dan pihak-pihak yang membiayai terorisme (Kementerian Luar Negeri Arab Saudi, 2017:53).

Dalam laporan itu juga disertakan addendum berupa kumpulan artikel-artikel yang dimuat di media *mainstream* yang berisi pembelaan terhadap Arab Saudi, antara lain artikel berjudul *Don't Blame Wahhabism for Terrorism* yang ditulis Mohammed Alyahya dan dimuat di New York Times (Oktober 2016). Alyahya berargumen sebagian besar teroris tidaklah berideologi Wahhabi, misalnya, Al Qaida muncul di kalangan Ikhwanul Muslimin dan Taliban berideologi Deobandi. Alyahya juga menyebut bahwa para pelaku teror di Eropa adalah mantan kriminal dan radikalisme mereka tidak terkait dengan teologi (Kementerian Luar Negeri Arab Saudi, 2017:70-71).

Perkembangan terbaru, pada bulan Maret 2018, Putra Mahkota Mohammed bin Salman dalam wawancaranya dengan media terkemuka AS, The Washington Post, menyatakan bahwa penyebaran Wahhabisme yang selama ini dilakukan Saudi, melalui 'investasi di masjid dan madrasah' di berbagai negara sejak era Perang Dingin merupakan permintaan dari negara-negara Barat demi mencegah pengaruh Uni Soviet di negara-negara Muslim. Bin Salman lebih lanjut menyatakan akan mendorong moderatisme (DeYoung, 2018). Ini merupakan pengakuan resmi yang kontradiktif dengan upaya penyangkalan yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri Arab Saudi melalui White Paper.

Dinamika politik Arab Saudi memunculkan pertanyaan bagaimanakah sebenarnya peran Arab Saudi dalam proliferasi atau penyebaran terorisme di dunia? Apa kepentingan politik luar negeri Arab Saudi di era pemerintahan Raja Salman sehingga menyangkal berkontribusi dalam aksi-aksi terorisme di berbagai penjuru dunia?

Dengan menggunakan teori konstruktivisme (relasi agen-struktur) dalam politik luar negeri, penulis mengemukakan argumen bahwa bahwa Arab Saudi sebagai agen mempersepsi identitasnya sesuai dengan tekanan perekonomian global dan masifnya kecaman masyarakat internasional terhadap kelompok-kelompok ekstrim yang didanai Arab Saudi. Menghadapi dua tekanan ini, Arab Saudi berusaha menggeser identitasnya menjadi negara moderat. Namun di saat yang sama, identitas sebagai pemimpin Dunia Islam vis a vis Iran membuat Saudi juga tetap mempertahankan penyebaran Wahhabisme.

Penulis menggunakan metode historis dalam pengumpulan data, yaitu dengan dengan menelusuri sejarah berdirinya kerajaan Arab Saudi serta rekam jejak keterlibatan Arab Saudi dalam pembentukan Al Qaida dan ISIS. Pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur terhadap buku, artikel jurnal, dan sejumlah dokumen resmi.

Teori Konstruktivisme dalam Kebijakan Luar Negeri

Politik luar negeri (foreign policy) antara lain didefinisikan sebagai tindakan konkrit suatu pemerintahan untuk merespon kondisi di luar wilayahnya (Rosenau, 1976:16). Sementara itu, menurut Neack (2008:9), dalam mempelajari politik luar negeri sebuah negara, perlu diidentifikasi penyebab dari suatu perilaku yang ditunjukkan negara (pemerintah) tersebut. Pada dasarnya, politik luar negeri dilakukan demi mencapai 'kepentingan nasional' suatu negara. Menurut Morghentau (dikutip Clinton, 1994), hubungan antara negara dengan kepentingan nasional merupakan produk sejarah dan akan lenyap seiring sejarah. Dengan kata lain, seiring perjalanan waktu dan perkembangan zaman, kepentingan nasional sebuah negara pun akan berubah. Pendapat ini antara lain terbukti di era globalisasi dewasa ini dimana seringkali kepentingan nasional sebuah negara amat dipengaruhi oleh kepentingan institusi internasional atau tekanan masyarakat internasional.

Fenomena ini dapat dijelaskan oleh teori konstruktivisme (dalam khazanah studi politik internasional) yang berpan-

dengan bahwa identitas dan kepentingan nasional sebuah negara (diistilahkan dengan 'agen') dibangun oleh struktur sosial (komunitas internasional) yang melingkupinya. Prinsip fundamental dalam teori konstruktivisme adalah bahwa manusia merespon sebuah objek berdasarkan pemaknaannya terhadap objek itu. Contohnya, negara X akan memberikan respon berbeda di hadapan negara Y dibandingkan dengan negara Z karena Y adalah negara musuh, sedang Z adalah negara sahabat. Jika X berhenti memaknai Y sebagai musuh, maka respon X terhadap Y akan berubah. Dengan demikian, pemaknaan bersama (*collective meanings*) di antara negara-negara akan membentuk struktur internasional dan membentuk perilaku negara-negara tersebut. Sebuah negara akan membentuk identitas dirinya dengan bergabung dalam *collective meanings* tersebut (Wendt, 1992).

Sejarah Berdirinya Kerajaan Arab Saudi

Arab Saudi secara resmi didirikan pada tahun 1932, namun kekuasaan Dinasti Saud di tanah Arab sudah bermula sejak abad ke-18. Nenek moyang dinasti ini, yaitu Saud bin Muhammad adalah pemimpin lokal di kawasan Diriyah atau Dariyah (dekat kota Riyadh di era modern). Pada tahun 1725, ia meninggal dunia dan digantikan oleh anaknya, Muhammad bin Saud dan sejak itulah Dinasti Saudi (Bani Saud) dimulai. Pada tahun 1745, seorang pendakwah Islam bernama Muhammad bin Abdul Wahhab diusir oleh warga di daerahnya, meminta perlindungan kepada Muhammad bin Saud. Kedua tokoh ini kemudian berkoalisi untuk misi penaklukan wilayah Arab. Untuk mencapai tujuan ini, Bin Saud memanfaatkan kekuatan militernya; sedangkan interpretasi yang ketat terhadap Islam yang dikembangkan oleh bin Wahhab dimanfaatkan untuk pretensi bagi pertempuran yang diklaim sebagai 'perang suci' (jihad). Aliansi keduanya berlanjut dalam tiga era negara Saudi (Henderson, 2009:1).

1. Negara Saudi Pertama

Era yang disebut sebagai ‘negara Saudi pertama’ dimulai ketika terjadi aliansi antara Muhammad bin Saud dengan Muhammad bin Abdul Wahhab pada sekitar tahun 1744-1745. Hubungan kedua tokoh ini semakin erat dengan adanya pernikahan antara putri Muhammad bin Abdul Wahhab dengan putra Muhammad bin Saud yang bernama Abdul Aziz bin Muhammad bin Saud. Putra pasangan ini, bernama Saud bin Abdul Aziz, lahir pada tahun 1748 dan kelak akan menjadi pemimpin besar di ‘negara Saudi pertama’ ini (Wynbrandt, 2004: 120).

Pada era ini, Bin Saud dan Bin Abdul Wahhab melancarkan operasi penaklukan wilayah dengan *pretensi* agama, yaitu siapapun yang tidak menerima ajaran Islam yang sesuai dengan penafsiran Bin Abdul Wahhab, akan dibunuh atau dipaksa pergi meninggalkan tanah Arab. Pasca meninggalnya Muhammad bin Saud pada 1765, kepemimpinan ‘negara Saudi pertama’ dilanjutkan Abdul Aziz yang tetap bekerja sama Bin Wahhab untuk menaklukkan sebagian besar wilayah Arab yang dikenal dengan istilah Nejd.

Dengan demikian terlihat bahwa sejak awal pembentukan Dinasti Saud, ulama dan narasi agama telah memainkan peran yang sangat penting. Ulama (Bin Abdul Wahhab) memberikan legitimasi atas aksi militer dan perluasan wilayah yang dilakukan oleh penguasa dan sebaliknya, penguasa (Bin Saud) memberikan kekuasaan kepada Bin Abdul Wahhab untuk mengimplementasikan ajaran Islam yang sejalan dengan visinya (Wynbrandt, 2004: 118).

Narasi pokok Wahhabisme (ajaran Muhammad Bin Abdul Wahhab) adalah purifikasi, yaitu mewajibkan umat Islam untuk kembali kepada Al Quran dan Sunnah dengan tingkat toleransi yang amat minim terhadap perbedaan penafsiran yang muncul di tengah kaum Muslimin. Baik Bin Saud maupun Bin Abdul Wahhab merupakan seorang Sunni Hanbali. Madzhab Hanbali adalah yang terkecil dan paling konservatif di antara keempat mazhab Islam; mereka menafsirkan hukum-

hukum agama secara sangat tekstualis. Selain itu, Hanbali menganggap sangat penting tiga generasi pertama dalam Islam, yakni Nabi Muhammad dan para pengikutnya yang menerima ajaran Islam secara langsung dari Nabi. Secara kolektif, generasi awal ini disebut salaf — yang berarti para pendahulu — dan orang yang mengikuti teladan mereka, dengan demikian, disebut seorang Salafi (Gearon, 2016:226).

Para pengikut Wahhabi, seringkali mengklaim bahwa mereka adalah pengikut Salafi. Menjadi Salafi, berarti sama dengan Wahhabi. Inilah yang seringkali membingungkan, padahal madzhab lainnya pun sama-sama mengklaim bahwa mereka juga adalah seorang Salafi. Jadi, poin pentingnya adalah bahwa semua Wahhabi adalah Salafi, tapi tidak semua Salafi adalah Wahhabi (Gearon, 2016:227).

Doktrin Wahhabisme sangat dipengaruhi ajaran ulama Hanbali, yaitu Ibnu Taimiyah, yang sangat terkenal dengan ucapannya, “Al-ruju’ ila al-Kitab wa al-Sunnah” (kembali ke Kitab Suci dan Sunnah). Muhammad bin Abdul Wahhab dalam menyusun doktrin politiknya terinspirasi dari ajaran Ibnu Taimiyah, yaitu bahwa negara harus dipimpin dua otoritas yang berdiri sejajar, yaitu pemimpin dan ulama (Stenslie, 2018:65).

Dalam bukunya yang berjudul *Majmu'atul Fatawa* (Kumpulan Fatwa), Ibnu Taimiyah berkata, “... tujuan diutusnya para rasul dan diturunkannya kitab-kitab suci adalah supaya manusia dapat melaksanakan keadilan berkenaan dengan hak-hak Allah dan hak-hak makhlukNya. Kemudian Dia berfirman, ‘Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatNya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa’ (Al-

Quran surat Al-Hadid ayat 25). "Kemudian Ibnu Taimiyah berkata, "Barangsiapa menyimpang dari Kitab Suci, ia harus diluruskan dengan besi. Karena itu, tegaknya agama itu dengan Kitab dan pedang" (Taimiyah, 2007:282-283).

Selanjutnya pada bab *Jihad Fi Sabilillah* (berperang di jalan Allah) Ibnu Taimiyah juga mengatakan bahwa orang-orang Tartar (Mongol) dan Syiah, meskipun sudah bersyahadat, adalah kafir. Kedua golongan ini menurut Ibnu Taimiyah hukumnya wajib untuk diperangi (Taimiyah, 2007). Atas dasar justifikasi teologis seperti inilah Dinasti Saud dan Bin Wahhab memilih strategi militer dengan *pretensi* memurnikan jazirah Arab dari kelompok-kelompok yang anggap mereka kafir maupun yang dianggap melakukan bid'ah (inovasi ajaran Islam/sesuatu yang mengada-ada).

Pada 1792, Muhammad bin Abdul Wahhab meninggal dunia dan posisinya digantikan oleh saudaranya, Sulaiman bin Abdul Wahhab. Sulaiman sebelumnya adalah pengkritik kakaknya sendiri, namun kemudian dikenai tahanan rumah dan gerak-geriknya diawasi oleh penguasa. Oleh karena itu, selama masa jabatannya sebagai pemimpin ulama, Sulaiman tidak melakukan perubahan dalam ajaran atau kebijakan yang telah ditetapkan kakaknya (Wynbrandt, 2004: 132).

Pasca meninggalnya Muhammad Bin Abdul Wahhab, Abdul Aziz meneruskan operasi penaklukan dan perluasan wilayah. Posisi kehancuran dan pembunuhan terjadi dari titik ke titik di seluruh Semenanjung Arab. Muslim Syiah adalah golongan yang paling menderita akibat perlakuan kekerasan Saud-Wahhab, mereka terbunuh dalam jumlah besar yang angka pastinya tidak diketahui (Gearon, 2016:229). Di antara penyerangan besar yang terjadi adalah serangan 12.000 tentara Saud ke kota Karbala dan membunuh 4.000 warga Syiah di kota itu pada tahun 1802. Mereka juga menghancurkan makam-makam yang dimuliakan kaum Syiah (antara lain makam cucu Nabi Muhammad SAW, Hussein bin Ali). Tahun berikutnya, mereka melanjutkan operasi militer ke Mekah. Warga Mekah yang

telah mendengar berita pembantaian di Karbala segera menyerah dan menyatakan tunduk pada kepemimpinan Dinasti Saud (Smitha, 2001). Namun pada 1803, mereka terusir dari Mekah setelah Sharif Ghalib pemimpin Mekah) meminta bantuan dari pasukan Ottoman (Wynbrandt, 2004: 136).

Aktivitas agresif Dinasti Saud bukannya tanpa konsekuensi. Pada tahun 1803 Abdul Aziz dibunuh oleh seorang suku Kurdi, yang kemudian segera dibunuh setelah kejadian tersebut. Orang Kurdi itu diperkirakan berasal dari Karbala dan menyaksikan penaklukan dan pembantaian di kota tersebut (Wynbrandt, 2004: 136). Abdul Aziz digantikan oleh anaknya, Saud bin Abdul Azis yang selama ini telah mendampingi ayahnya dalam berbagai penaklukan wilayah di semenanjung Arab. Setelah menjadi penguasa, Saud melanjutkan upaya penaklukan, kali ini ke Basra, lalu berlanjut ke Mekah. Untuk kedua kalinya, pada 1805, pasukan Saud kembali menjadi penguasa Mekah. Tahun-tahun berikutnya, operasi penaklukan berlanjut ke berbagai wilayah di Irak dan Suriah.

Namun kekuasaan mereka tidak bertahan lama karena pada tahun 1811, Sultan Ottoman mengirim pasukan untuk melawan mereka. Serbuan Dinasti Ottoman yang merupakan dinasti Islam terkuat pada masa itu dan Hijaz merupakan bagian dari kekuasaan Ottoman. Saud bin Abdul Azis dan pasukannya kemudian mundur ke Diriyah, daerah asal mereka. Pada 1814, Saud meninggal dunia dan digantikan oleh anaknya, Abdullah. Setelah melalui peperangan yang panjang, sekitar tujuh tahun, Dinasti Saud atau 'Negara Saudi Pertama' dinyatakan runtuh pada tahun 1818. Keruntuhan ini yang ditandai dengan dipenggalnya Abdullah, di Konstantinopel, ibu kota Ottoman (Wynbrandt, 2004: 142-143; Gearon, 2016: 229-230).

2. Negara Saudi Kedua

Dinasti Saud kembali meraih kekuasaan di kawasan Nejd pada tahun 1824 di bawah kepemimpinan Turki bin Adullah,

cicit lainnya dari Muhammad bin Saud. Dinasti ini secara historis disebut dengan Negara Saudi Kedua.

Pasca kekalahan Negara Saudi Pertama, ulama Wahhabi bernama Sulaiman bin Abdallah Al aI-Sheikh, cucu dari Abdul Wahhab, mencoba mengevaluasi. Salah satu faktor penyebab kekalahan mereka adalah dukungan penduduk Arab kepada pasukan Ottoman. Ketika Ottoman melakukan invasi, penduduk Arab, yang sebelumnya terpaksa tunduk kepada Dinasti Saud dan menerapkan ajaran Wahhabi, menyambut mereka dengan suka cita yang berakibat pada kekalahan pasukan Saud.

Sulaiman menulis sebuah risalah yang berjudul *al-Dala'il fi Hukm Muwalat Ahl al-Ishrak* (dalil hukum tentang kesetiaan terhadap orang kafir/musyrik). Risalah tersebut berisi argumen, jika seorang Muslim menunjukkan kesetiaan terhadap orang-orang musyrik, ia akan termasuk dalam golongan orang-orang yang musyrik juga. Dalam doktrin Wahhabi, orang-orang Ottoman dikategorikan sebagai musyrik karena mempraktekan bid'ah seperti ziarah kubur, memiliki koneksi yang kuat dengan tradisi sufisme, dan memusuhi aliansi Saud-Wahhab. Ulama Wahhabi menilai pembelotan yang dilakukan oleh warga Arab terhadap kepemimpinan Saud-Wahhab sebagai bentuk ketidaksetiaan terhadap pemimpin (Wagemakers, 2012:95).

Apa yang ditulis oleh Sulaiman merupakan evolusi pertama doktrin Wahhabi. Jika pada era sebelumnya ajaran Wahhabi lebih memfokuskan perhatian kepada persoalan sosial-individual seperti mengharamkan ziarah kubur, mengecam tradisi/pemikiran sufisme, melarang penghormatan kepada para wali dan imam, atau hal-hal lain yang menurut mereka mengarah kepada syirik (menyamakan Tuhan dengan objek selain Tuhan), risalah yang ditulis Sulaiman membawa ajaran Wahhabi ke sebuah dimensi yang baru, yakni politik, khususnya mengenai pengakuan seorang Muslim kepada pemimpin kafir. Wahhabi memandang bahwa orang-orang yang setia atau tunduk kepada pemimpin kafir (dalam hal ini adalah Ottoman), otomatis

mereka akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang kafir.

Negara Saudi Kedua ini diwarnai oleh konflik perebutan kekuasaan. Setelah Turki bin Adullah meninggal, ia digantikan anaknya, Faisal. Faisal meninggal pada tahun 1865 dan putranya, Abdallah, diangkat menjadi penguasa baru. Abdallah menikmati dukungan dari para ulama Wahhabi dan karenanya statusnya sebagai raja baru menjadi kuat. Walaupun demikian, ia mendapat penentangan dari saudaranya yang bernama Saud. Pada 1871, Saud berhasil menggulingkan Abdallah namun berbuntut perang saudara yang berlanjut sampai lebih dari satu dekade. Kondisi ini membuat Negara Saudi Kedua melemah. Dengan kondisi ini Muhammad bin Rashid, pemimpin sebuah dinasti pesaing, dapat dengan mudah mengambil alih kekuasaan keluarga Saud. Dengan demikian, negara Saudi kedua berakhir pada akhir abad ke-19 (Wagemakers, 2012:95-96)

Di tengah terjadinya perang saudara pada era Negara Saudi Kedua, karya Sulaiman bergema kuat. Hal ini terjadi ketika Abdallah meminta bantuan Ottoman untuk mempertahankan kekuasaannya. Hamad bin Atiq, ulama ternama pada waktu itu menulis *Sabil al-Najat wa-l-Fikak min Muwalat al-Murtaddin wal-Atrak* (melepaskan dan memisahkan diri dari kesetiaan kepada orang-orang murtad dan Turki), yang merupakan pengembangan dari karya Sulaiman. Dalam buku itu, Ibnu Atiq berpendapat bahwa umat Islam seharusnya tidak hanya menahan diri dari memberikan kesetiaan kepada non-Muslim tetapi juga mereka harus secara aktif menolak mereka. Dia bahkan menyatakan bahwa Muslim dapat menunjukkan iman mereka dengan benar hanya jika mereka menolak orang kafir (Wagemakers, 2012).

Kepada hakim Wahhabi, Muhammad bin Ibrahim bin Ajlan, Ibnu Atiq menuduhnya kafir karena telah mendukung keputusan Abdallah. Ulama Wahhabi ternama lainnya, Abdul Latif bin Abdurrahman Al aI-Sheikh mendukung Ibnu Atiq, dia

menulis surat kepada Abdallah dan Ibnu Ajan, “Adapun pertanyaan untuk meminta mereka (Ottoman) bantuan, itu kontroversial, melainkan (pandangan) yang benar adalah... bahwa itu benar-benar terlarang” (Wagemakers, 2012). Abdul Latif bahkan menyerukan kepada Muslim umumnya, dan khususnya kepada keluarga Saud untuk melaksanakan jihad melawan Ottoman (Wagemakers, 2012).

Apa yang ditulis oleh Ibnu Atiq dan Abdul Latif merupakan bentuk evolusi lainnya dari ajaran Wahhabi. Jika evolusi pertama yang diajarkan oleh Sulaiman sebatas mengkritisi perilaku masyarakat yang menunjukkan kesetiaan terhadap orang kafir, maka evolusi kedua ini kritik justru diarahkan kepada penguasa (Abdallah) yang mereka anggap kafir karena telah meminta bantuan kepada orang kafir (Ottoman). Dengan demikian, Wahhabi yang tadinya sebatas mengajarkan hukum-hukum sosial kemasyarakatan yang personal, kali ini telah masuk ke wilayah politik dalam cakupan yang lebih luas, yakni hubungan/politik luar negeri.

Negara Saudi Kedua akhirnya runtuh pada tahun 1891 akibat perang saudara dan kemudian kekuasaan diambil alih oleh Bin Rashid dari Hail.

3. Negara Saudi Ketiga

Berdirinya Negara Saudi Ketiga dimulai ketika tahun 1902, Abdul Aziz bin Abdul Rahman bin Faisal Al Saud (yang dikenal dengan nama Bin Saud) mengambil alih kota Riyadh dari tangan klan Bin Rashid. Bin Saud dibesarkan di pengungsian di Bahrain, setelah tahta ayahnya direbut oleh klan Bin Rashid. Ia tumbuh besar dengan memimpikan kembalinya kekuasaan Dinasti Saudi dan ajaran Wahhabi di semenanjung Arab (Wynbrandt, 2004:167). Setelah menguasai kota Riyadh, Bin Saud melakukan penaklukan-penaklukan di kawasan lainnya masih dikuasai klan Rashid. Untuk kepentingan tersebut, pada 1912 Bin Saud mendirikan milisi berbasis ideologi Wahhabi yang dinamai Ikhwan. Dengan menggunakan doktrin ‘hijrah’, suku-suku Badui yang biasa hidup berpindah-pindah

didorong untuk menetap di suatu kawasan yang disediakan oleh Bin Saud. Hingga 1915, Bin Saud berhasil merekrut 60.000 pasukan Ikhwan dari kalangan suku-suku yang hijrah tersebut. Berkat bantuan Ikhwan, Bin Saud berhasil menjadi penguasa di Nejd dan kawasan selatan Arab yang semula dikuasai Ottoman (Wynbrandt, 2004:172).

Bin Saud melanjutkan operasi penaklukan wilayah-wilayah lainnya dan pada tahun 1925, mereka menguasai kawasan Hijaz, termasuk kota Mekah dan Madinah. Penguasa Hijaz saat itu Sharif Hussein terpaksa melarikan diri dan kemudian diberi wilayah kekuasaan di Irak dan Transjordan oleh Inggris. Secara resmi, Abdul Aziz bin Saud mendeklarasikan diri sebagai raja di negara baru bernama Saudi Arabia pada September 1932.

Wagemakers membagi dua pemikiran Wahhabi, yaitu Wahhabi sosial dan Wahhabi politik. Pemikiran dasar Wahhabi sosial adalah sikap menjauhi politik, diam dan taat terhadap pemimpin, serta berfokus pada penyebaran ajaran agama di tengah masyarakat. Sebaliknya, Wahhabi politik memandang bahwa agama terkait dengan politik sehingga para ulama Wahhabi politik bersikap kritis kepada penguasa. Pada era 'negara Saudi ketiga' atau Arab Saudi, pemikiran Wahhabi sosial inilah yang mendominasi.

Pasca keruntuhan 'negara Saudi kedua', para ulama Wahhabi memikirkan ulang posisi mereka yang sebelumnya bersikap sebagai oposan terhadap pemerintah. Runtuhnya negara Saudi membuat mereka kehilangan penguasa yang dapat melindungi mereka dan menjamin tegaknya ajaran Wahhabi di masyarakat. Karena mereka menyadari bahwa ide-ide mereka hanya dapat dilaksanakan di bawah perlindungan seorang pemimpin yang kuat, mereka bersumpah untuk tetap tunduk kepada penguasa dan menghindari fitnah (kekacauan, perselisihan) dan perang saudara di masa depan (Wagemakers, 2012:97).

Konsep baru ini menekankan *sam'* (mendengarkan) dan *taa'ah* (kepatuhan) kepada pemimpin demi bertahannya jamaah dan ajaran Islam itu sendiri. Sikap ini diringkas dalam ungkapan *la din illa bi-jamaa wa-la jama'a illa bi-imama wa-la imama illa bi-sam wa-ta'a* (tidak ada agama kecuali melalui jamaah, tidak ada jamaah kecuali melalui kepemimpinan, dan tidak ada kepemimpinan kecuali melalui mendengarkan dan kepatuhan). Pada fase ini maka Wahhabi kembali ke dimensi lamanya yang lebih menekankan kepada ajaran-ajaran sosial kemasyarakatan personal, dan pengembangannya adalah kepatuhan kepada pemimpin (Wagemakers, 2012:97).

Ulama-ulama Wahhabi abad ke-20 cenderung menghindari atau bahkan sama sekali tidak ingin membahas karya-karya ulama Wahhabi abad ke-19 yang politis seperti Sulaiman bin Abdallah Al aI-Sheikh, Hamad bin Atiq, dan Abdul Latif bin Abdurrahman Al aI-Sheikh. Sebagai contoh, Muhammad bin Ibrahim Al aI-Sheikh (meninggal 1969), mantan mufti Arab Saudi dan salah satu ulama Wahhabi paling terkemuka pada abad ke-20, mengatakan bahwa Allah hanya memberikan dua perayaan kepada Muslim, yakni Idul Fitri dan Idul Adha, menambahkan yang lainnya maka sama saja dengan menyeyrupai orang kafir (*mushabihat al-kuffar*), dan itu terlarang (Wagemakers, 2012:97-98).

Contoh lainnya datang dari Abdul Aziz bin Baz (meninggal 1999) dan Muhammad bin Salih al-Uthaymin (meninggal 2001). Berdasarkan perkataan Nabi Muhammad, keduanya menyimpulkan bahwa perlu untuk membedakan diri dari non-Muslim dengan tidak pernah menyapa mereka terlebih dahulu, atau memberikan salam dengan tangan — karena dianggap sebagai bagian dari perilaku orang kafir, dan ucapan “*assalamualaikum*” hanya boleh diucapkan kepada sesama muslim saja (Wagemakers, 2012:98).

Masih banyak lagi contoh-contoh lainnya yang sejenis, namun pada intinya mereka memiliki dua kesamaan. Pertama, mereka mendorong Muslim untuk menjauhkan diri dari apa

pun yang mungkin menodai kemurnian keyakinan mereka dan yang mengarah kepada kesukaan terhadap hal-hal yang dianggap tidak Islami. Kedua, mereka hanya berurusan dengan isu-isu sosial dan tidak membahas hal-hal politis yang mungkin mengarah pada kritik terhadap negara. Dalam buku yang disebarluaskan oleh *World Muslim League* yang disponsori pemerintah, dicantumkan pendapat ulama bernama Hatim Al 'Awni yang mengkonter pendapat ulama sebelumnya yang mengkafirkan orang yang meminta bantuan kepada orang kafir dalam memerangi sesama Muslim. Menurut Al 'Awni, meminta bantuan kepada orang kafir dalam perang melawan sesama Muslim tidaklah membuat seseorang menjadi kafir, kecuali jika ada bukti bahwa ia betul-betul melepaskan keimanan dari hatinya (Wagemakers, 2012:98-99).

Dominannya ajaran Wahhabi sosial tidak berarti tunduknya para penganut pemikiran Wahhabi politik. Justru sebaliknya, mereka melakukan perlawanan terhadap penguasa. Milisi Ikhwan berada di dalam kelompok Wahhabi politik ini. Mereka berbalik melawan Bin Saud setelah ia menerima bantuan dana dan persenjataan dari Inggris untuk berperang melawan Sharif Hussein (penguasa Hijaz). Ikhwan juga menolak berbagai pembaharuan yang dilakukan Bin Saud, seperti telepon, yang mereka sebut sebagai 'perangkat setan'. Pada tahun 1929 Ikhwan memberontak dan menduduki Mekah. Atas bantuan Inggris, Abdul Aziz Bin Saud berhasil menumpas mereka pada tahun yang sama (Smitha, 2001; Hegghammer dan Lacroix, 2007).

Pada tahun 1950-1960, seiring era Perang Dingin, kelompok-kelompok komunis di Saudi mulai melakukan perlawanan sehingga Dinasti Saud kembali mendekati kelompok-kelompok religius untuk mengontrol masyarakat. Pendanaan terhadap organisasi-organisasi keagamaan meningkat dan gerakan mereka juga semakin marak.

Secara umum gerakan Wahhabisme di Saudi pada masa itu terbagi dua: pertama, gerakan Al Sahwa yang dipengaruhi oleh pandangan politik Ikhwanul Muslimin (IM) karena saat itu

banyak anggota IM yang melarikan diri dari represi pemerintah Mesir dan Suriah. Mereka berkembang di kampus-kampus dan segera menguasai sektor pendidikan dan media di Saudi. Mereka berusaha melakukan reformasi di kerajaan, namun tidak melakukan perlawanan frontal terhadap kerajaan (Hegghammer dan Lacroix, 2007). Pada tahun 1990-an, setelah AS membuat pangkalan militer di Saudi, mereka secara terbuka melakukan kritik kepada pemerintah. Sejak itu, hubungan IM dan rezim Saud semakin memanas dan terus berlanjut hingga era *Arab Spring*. Ketika IM di Mesir melakukan perlawanan terbuka pada pemerintah setelah tergulingnya Presiden Mursi, Raja Abdullah menetapkan IM sebagai organisasi teroris dan membantu pemerintah Mesir dalam membungkam IM (Alexander dan Dodge, 2017).

Sementara itu, kelompok Wahhabi puritan yang tekstualis dan mengisolasi diri dari segala bentuk modernitas (*bid'ah*) semakin dipengaruhi oleh pandangan-pandangan ulama asal Suriah, Al Albani yang sangat tekstualis sehingga pengikutnya mengembangkan puritanisme yang lebih ketat. Al Albani diundang mengajar di Madinah pada tahun 1961 oleh ulama Saudi, Abdul Aziz bin Baz. Salah satu pengikut bin Baz dan Al Albani adalah Juhayman al-Utaibiy yang pada 1979 mengobarkan perlawanan bersenjata terhadap rezim Saud yang menurutnya telah banyak melakukan *bid'ah*, dengan menduduki Masjidil Haram. Gerakan Juhayman segera ditaklukkan pasukan pemerintah yang dibantu oleh tentara Perancis (Hegghammer dan Lacroix, 2007).

Selanjutnya, pada 1980-an, seiring dengan perlawanan rakyat Afghanistan terhadap pendudukan Uni Soviet, muncul kelompok Wahhabi jenis ketiga, yaitu Wahhabi-jihadis yang mengirimkan petempur ke Afghanistan. Sebagian pengikut Wahhabisme dari kelompok pertama dan kedua bergabung dalam kelompok ketiga ini. Osama bin Laden merupakan salah satu pengikut kelompok kedua yang ikut berjihad di Afghanis-

tan dan kemudian mendirikan jaringan Al Qaida (Hegghammer dan Lacroix, 2007; Gause, 2004).

Keberadaan tiga jenis gerakan Wahhabi ini dan catatan sejarah mengenai aksi perlawanan kelompok Wahhabi politik terhadap Dinasti Saud menunjukkan adanya ambiguitas peran Arab Saudi dalam menyikapi terorisme. Di satu sisi, sangat jelas sejak awal berdirinya negara Saudi, ideologi Wahhabi dimanfaatkan untuk melegitimasi penaklukan jazirah Arab. Penaklukan itu menggunakan *pretensi* memurnikan jazirah Arab dari kelompok-kelompok yang dikategorikan kafir maupun pelaku bid'ah. Namun di sisi lain, pemerintah Saudi juga memiliki rekam jejak perlawanan terhadap kelompok garis keras Wahhabi di dalam negeri. Hal inilah dijadikan argumen oleh Kementerian Luar Negeri Arab Saudi dengan menyatakan bahwa Arab Saudi adalah target utama ISIS dan kelompok teror lainnya dan bahwa Saudi adalah salah satu negara yang terdepan dalam melawan terorisme dan pihak-pihak yang membiayai terorisme (Kementerian Luar Negeri Arab Saudi, 2017:53).

Pergeseran Identitas dan Politik Luar Negeri Arab Saudi

a. Hubungan Arab Saudi dan Amerika Serikat

Hubungan erat antara Arab Saudi dan Amerika Serikat (AS) dimulai sejak awal berdirinya 'negara Arab Saudi ketiga' atau sejak Raja Abdulaziz bin Saud berkuasa pada 1932. Hubungan ini diawali oleh kerjasama di bidang eksplorasi minyak. Pada Perang Dunia II, Arab Saudi secara resmi mengambil posisi netral namun mengizinkan tentara Sekutu melewati wilayah udaranya. Pada tahun 1973, hubungan kedua negara sempat memburuk akibat dukungan AS kepada Israel dalam perang Yom Kippur 1973. Namun, Revolusi Islam Iran tahun 1979, yang merugikan AS karena tergulingnya sekutu dekatnya, Shah Pahlevi, dan mengkhawatirkan Dinasti Saudi membuat hubungan kedua negara semakin erat dan Arab Saudi menjadi sekutu utama AS di kawasan (Council of Foreign Relations, 2018). Saudi mengekspor minyak terbesar dari AS,

dan pembeli senjata terbesar AS; serta kreditor utama bagi AS, membeli treasury bond dan menanamkan investasi dalam industri AS (Bahgat,2004).

Revolusi Islam Iran membuat Dinasti Saudi merasa terancam sehingga mencari perlindungan dari AS. Pada tahun 1975, Raja Faisal mengatakan, “Hubungan dengan AS adalah sebuah pilar dari kebijakan Saudi” (Stenslie, 2018:67). Persepsi Saudi yang memandang Iran sebagai rival terlihat hingga kini, antara lain, serangan Saudi ke Yaman sejak 2015 disebut sebagai upaya melawan pengaruh Iran di kawasan. Pangeran Bin Salman juga mengatakan, “Jika Iran membuat senjata nuklir, Saudi pun akan membuatnya” (DeYoung, 2018).

Kedekatan ini juga dipengaruhi oleh kehadiran Uni Soviet di Afghanistan (1979-1989). Baik AS maupun Saudi bersama-sama mendukung kelompok Mujahidin Afghanistan untuk menghadang ekspansi komunisme di kawasan dengan cara memberikan dana, senjata, dan berbagai pelatihan militer. Khususnya, Saudi merupakan penyuplai petempur terbanyak untuk gerakan mujahidin di Afghan. Pada bulan April 2009, Menteri Luar Negeri AS, Hillary Clinton, memberikan pernyataan di depan Kongres AS:

“The people we are fighting today we funded them twenty years ago... and we did it because we were locked in a struggle with the Soviet Union. ...let them [jihadist] come from Saudi Arabia and other countries, importing their Wahabi brand of Islam so that we can go beat the Soviet Union.”(Dawn, 2009).

Taklama setelah Soviet meninggalkan Afghanistan tahun 1989, Riyadh memberikan bantuan signifikan kepada Taliban. Saudi merupakan satu dari 3 negara yang memberikan pengakuan diplomatik kepada Taliban pada 1997. Uang dari Saudi sangat krusial bagi Taliban dalam memperluas kekuasaannya di Afghanistan. Menurut Bahgat (2004), ada 3 alasan mengapa Saudi mendukung Taliban. Pertama, Taliban menjanjikan berakhirnya perang sipil di Afghanistan dan menciptakan stabilitas di kawasan. Kedua, gerakan Taliban memiliki ideologi

Wahhabisme. Dan ketiga, Riyadh memandang keberadaan pemerintahan Sunni fundamentalis in Afghanistan akan menjadi deterrence yang baik bagi pemerintahan Syiah di Iran.

Alasan kedua dan ketiga sangat mewarnai kebijakan luar negeri Arab Saudi di berbagai negara muslim, yaitu secara aktif menyebarkan ideologi Wahhabi. Menurut website resmi Kerajaan Arab Saudi, era Raja Fahd (1982-2005), kerajaan telah mengeluarkan dana jutaan dollar untuk 1.500 masjid, 210 pusat-pusat keislaman, 202 perguruan tinggi Islam, dan 2.000 madrasah serta mendanai 4000 pendakwah di negara-negara non-Muslim di Asia tengah, selatan, dan tenggara; Afrika, Eropa, dan Amerika Utara. Selain itu, diperkirakan empat perlima penerbitan di seluruh dunia dikontrol oleh pengikut Wahhabisme yang berperan penting dalam menyebarkan ideologi mereka (C. Choksy dan J.Choksy, 2015).

Dukungan terbuka Saudi kepada rezim Taliban mulai memburuk pada tahun 1998 ketika Mullah Omar (pimpinan Taliban) melindungi Osama bin Laden yang telah menegakkan Dinasti Saudi yang menurutnya “tidak Islami, korup, dan bekerja sama erat dengan AS.” Puncaknya, pasca aksi teror 9/11 (pengeboman menara WTC di AS pada 9 September 2001) dimana AS secara resmi menyatakan bahwa pelakunya adalah Osama bin Laden, Arab Saudi menghentikan bantuannya kepada Taliban (Bahgat, 2004). Selanjutnya, atas desakan AS, Saudi memperketat aliran pendanaan kepada kelompok-kelompok Wahhabi di seluruh dunia. Selama tahun 2002, pemerintah Saudi melakukan beberapa langkah, antara lain mewajibkan persetujuan dari Kementerian Luar Negeri untuk setiap pengiriman dana sosial ke luar negeri, melakukan audit terhadap lembaga-lembaga sosial yang selama ini aktif menyebarkan dana ke luar negeri, serta mendirikan komite pengawasan khusus (C. Choksy dan J.Choksy, 2015).

Namun di tahun-tahun berikutnya, terbukti bahwa aliran dana dari Saudi ke lembaga-lembaga penyebaran Wahhabisme di seluruh dunia tetap berlangsung atas sepengetahuan AS.

Dalam kabel diplomatik yang dikirim kedutaan AS di Saudi tahun 2009, disebutkan bahwa komite pengawasan khusus lembaga-lembaga donasi yang dijanjikan Arab Saudi tahun 2002 sama sekali tidak dibentuk; pengawasan itu tidak meliputi organisasi multilateral seperti International Islamic Relief Organization (IIRO), Muslim World League (MWL) and the World Assembly of Muslim Youth (WAMY) Organisasi-organisasi itu masih terus mengirimkan dana ke luar negeri, termasuk kepada kelompok-kelompok ekstrim. Kedutaan AS menyimpulkan bahwa Saudi Arabia tetap menjadi pendukung utama AlQaida, the Taliban, Laskar-e-Taiba, dan berbagai kelompok teror lainnya (Wikileaks, 2009).

Kabel diplomatik ini sejalan dengan wawancara yang dilakukan New York Times dengan Agha Jan Motasem, menteri keuangan Taliban, yang mengaku sering datang ke Saudi dalam musim haji dan mendapatkan dana dari pemerintah Saudi dan donatur lainnya. Hal ini juga terkonfirmasi dari laporan pemerintah Afghanistan yang menyatakan bahwa selama 2016, Taliban telah melakukan serangan ke 8 provinsi dengan 40.000 petempur dan diperkirakan menghabiskan dana 1 miliar dollar. Di saat yang sama, Saudi Arabia juga menawarkan kerjasama di bidang pertahanan dan pembangunan dengan pemerintah Afghanistan. Bahkan Raja Abdullah pernah mengupayakan negosiasi antara Presiden Karzai dan Taliban (Gall, 2106).

Pada tahun 2014, Wapres AS, Joe Biden dalam pidatonya di Harvard's Kennedy School of Government menyatakan bahwa Turki, Saudi, dan Emirat menyuplai ratusan juta dollar dan puluhan ton senjata kepada AlNusra, Al Qaeda, berbagai kelompok ekstrim yang berdatangan ke Suriah dari berbagai negara (Taylor, 2014). Pernyataan Biden terkonfirmasi oleh pernyataan Mulham al-Drobi, tokoh Ikhwanul Muslimin, dua tahun sebelumnya bahwa mereka [IM] mengirimkan senjata kepada pemberontak dengan dana dari 'private individuals' dan negara-negara Teluk, termasuk Saudi Arabia and Qatar (DeYoung dan Sly, 2012).

Pasca 911, AS juga menekan Arab Saudi untuk merevisi kurikulum sekolahnya, agar tidak lagi mengandung konten radikal. Pada 2013, *International Center for Religion and Diplomacy* dengan didanai Kementerian Dalam Negeri AS menerbitkan laporan evaluasi terhadap buku sekolahan yang resmi diterbitkan kerajaan. Mereka menemukan konten-konten kekerasan belum sepenuhnya dihapus. Di antaranya, anak kelas 7 diajarkan bahwa bertempir melawan orang-orang sesat adalah amal yang paling disukai Allah, anak kelas 8 diajari bahwa zakat harus diberikan kepada mujahidin; mujahidin harus diberi senjata anak kelas 10 diajari bahwa Muslim yang mengabaikan ajaran Islam harus dipenjara 3 hari dan bila mereka tidak berubah perilaku, mereka harus dibunuh (Shane, 2016).

Setelah ISIS mendirikan 'pemerintahan' di Raqqa dan beberapa kawasan lain di Suriah, pada 2013, mereka mengadopsi buku-buku teks resmi Saudi untuk sekolah-sekolahnya sampai mereka menerbitkan buku-bukunya sendiri pada tahun 2015. Dari 12 karya para cendekiawan Muslim yang diterbitkan ulang oleh ISIS, tujuh di antaranya ditulis oleh Muhammad ibn Abd al-Wahhab, pendiri Wahhabisme. Hal ini kemudian dikomentari oleh mantan Imam Masjidil Haram Sheikh Adil al-Kalbani dalam sebuah wawancara televisi pada bulan Januari 2016 bahwa ISIS "mengambil ide-ide dari buku-buku dan prinsip-prinsip kita" (Shane, 2016).

Di sini terlihat bahwa kebijakan luar negeri Arab Saudi terkait penyebaran ideologi Wahhabisme sangat tarik ulur dengan AS. Arab Saudi selalu mendukung kepentingan AS di Timur Tengah, mulai dari Perang Afghanistan hingga Perang Melawan Terorisme pasca 911. Di satu sisi, para pemimpin Saudi memandang penting hubungan baik dengan Barat, terutama AS, sehingga secara resmi selalu menyatakan perlawanan terhadap terorisme. Tekanan AS kepada Saudi untuk mencegah aliran dana dari Saudi ke kelompok-kelompok ekstrim dan mengubah kurikulum sekolah yang mengandung

ideologi Wahhabisme diakomodasi oleh Saudi, namun di saat yang sama Saudi tetap melanjutkan kepentingan strategisnya sendiri.

Ketika AS memiliki kepentingan untuk menggulingkan Assad (upaya yang sebenarnya sudah dilakukan sejak tahun 1980-an), Saudi juga memberikan dukungan dengan mendanai kelompok-kelompok ekstrim yang berideologi Wahhabi (Al Nusra, ISIS) dan membiarkan 2500 warganya bergabung dengan milisi-milisi tersebut. Namun ketika akhirnya terjadi *backlash* atau serangan balik, ketika milisi-milisi jihad melakukan aksi-aksi bom bunuh diri di dalam negeri Saudi, Saudi segera menyatakan bahwa Al Nusra (dan Ikhwanul Muslimin) sebagai organisasi teroris dan menangkapi warganya yang menjadi anggota kelompok tersebut (BBC, 2014).

b. Struktur Internasional dan Pergeseran Identitas Arab Saudi

Perubahan kondisi perekonomian global, terutama yang terkait dengan perdagangan minyak, memberi dampak pada kondisi domestik Arab Saudi. Pada tahun 2015, Saudi menggenjot produksi minyaknya dengan tujuan harga minyak dunia turun sehingga menekan perekonomian beberapa negara yang dipersepsinya sebagai musuh, yaitu Iran, Rusia, dan Venezuela. Namun yang terjadi adalah merosotnya harga minyak yang tak terkendali, yaitu 115 Dollar AS per barel pada bulan Juni 2014 menjadi 44 Dollar AS per barel pada November 2015, dan 53-58 Dollar AS per barel pada Februari 2017. Jatuhnya harga minyak membuat Saudi mengalami defisit ekonomi karena di saat yang sama, negara ini tengah menanggung pembiayaan perang yang amat besar di Yaman dan Suriah. Saudi terpaksa memakai cadangan devisanya sebesar 10 miliar Dollar AS per bulan untuk membayar anggaran belanja negara dan meminjam uang kepada pasar uang internasional (Hallinan, 2015).

Sebagai upaya solusi, pada tahun 2016 pemerintah Arab Saudi mencanangkan strategi ekonomi baru yang disebut Visi 2030 yang intinya mengurangi ketergantungan Saudi pada minyak dan melakukan diversifikasi ekonomi, termasuk me-

ngembangkan turisme. Dalam rangka itulah, Saudi melakukan banyak perombakan aturan di dalam negeri, antara lain mengizinkan konser-konser musik Barat dan memberi perempuan hak untuk mengemudi dan berkarir di luar rumah. Pangeran Bin Salman dalam wawancaranya dengan Washington Post menyatakan bahwa sikap konservatif bukan bagian dari doktrin Islam. "Saya percaya Islam itu masuk akal, Islam itu sederhana, dan orang-orang berusaha membajaknya," kata Bin Salman (DeYoung, 2018).

Sementara itu, ISIS telah melebarkan aksi-aksi terornya ke berbagai penjuru dunia sehingga memunculkan kekhawatiran masyarakat internasional. Kecaman terhadap ajaran Wahhabisme/salafisme yang disebarluaskan oleh Arab Saudi sebagai sumber ideologi terorisme (sebagaimana dinyatakan secara eksplisit dalam laporan Parlemen Uni Eropa, 2013) membuat Arab Saudi harus menggeser identitasnya dari 'negara radikal' menjadi negara yang lebih moderat. Hal ini sangat diperlukan untuk keberhasilan Visi 2030 yang membutuhkan banyak investor dan turis datang ke Saudi.

Namun di saat yang sama, aliran dana kepada kelompok-kelompok radikal masih terus mengalir melalui yayasan-yayasan Saudi. Keberlanjutan aliran dana itu yang membuat berbagai kelompok radikal di berbagai penjuru dunia masih melanjutkan aktivitasnya hingga hari ini. Hal ini, selain disebutkan dalam laporan Henry Jackson Society (2017), pengakuan Taliban (Gall, 2016), juga diakui oleh Putra Mahkota Muhammad bin Salman yang berkata, "Pendanaan [dalam penyebaran Wahhabisme] kini lebih banyak dilakukan oleh yayasan-yayasan Saudi dibandingkan oleh pemerintah" (DeYoung, 2018).

Di sini terlihat adanya dualisme identitas yang ditunjukkan oleh Saudi dan keduanya sama-sama berkaitan dengan kepentingan nasional Saudi. Di satu sisi, untuk menarik investor asing (terutama negara Barat), pemerintah Saudi berupaya menunjukkan identitas baru sebagai negara yang moderat. Di

hadapan tekanan AS dalam kerangka *War on Terror*, Saudi melakukan berbagai langkah perlawanan terhadap terorisme, termasuk melarang aktivitas kelompok-kelompok radikal dan mereformasi 'kurikulum radikal' di sekolah-sekolah di dalam negeri (Al Awsaat, 2018). Namun di sisi lain, identitas Saudi sebagai negara pemimpin Dunia Islam dan persepsi Saudi kepada Iran sebagai rival, membuatnya tetap mempertahankan penyebaran ajaran Wahhabisme.

Kesimpulan

(1) Sejak awal berdirinya pemerintahan Dinasti Saud, ideologi Wahhabi dimanfaatkan untuk melegitimasi penaklukan jazirah Arab. Pretensi memurnikan jazirah Arab dari kelompok-kelompok yang dikategorikan kafir maupun pelaku bid'ah menjadi instrumen yang efektif dalam upaya penaklukan dan mempertahankan kekuasaan bagi Dinasti Saud.

(2) Arab Saudi bekerja sama dengan AS di era Perang Afghanistan, dan masa sesudahnya, dalam membangun kelompok-kelompok jihad yang menjadi cikal bakal Al Qaida.

(3) Arab Saudi melanjutkan pendanaan terhadap penyebaran ideologi Wahhabisme di seluruh dunia hingga hari ini.

(4) Seiring dengan perubahan dalam struktur internasional (jatuhnya harga minyak global dan masifnya perlawanan dunia terhadap ekstrimisme dan terorisme), Saudi sebagai 'agen' melakukan pergeseran identitas, yaitu menjadi negara yang moderat, ditandai dengan langkah pelarangan aktivitas radikalisme di dalam negeri, pembentukan aliansi militer anti-terorisme di luar negeri, pelonggaran aturan terkait perempuan, dan diversifikasi bisnis turisme.

(5) Di saat yang sama, Saudi tetap berusaha mempertahankan identitasnya sebagai pemimpin Dunia Islam di hadapan rivalnya, Iran, dengan mempertahankan penyebaran ajaran Wahhabisme di seluruh dunia, melalui pendanaan lewat yayasan dan individu (tidak lagi melalui negara) sehingga

dengan demikian, Arab Saudi tetap berperan dalam proliferasi radikalisme dan terorisme.

Daftar Rujukan

- Al Awsat. 2018. "Saudi Arabia Combats Radical Ideology by Reforming National Curriculum". <https://aawsat.com/english/home/article-/1213411/saudi-arabia-combats-radical-ideology-reforming-national-curriculum>
- Alexander, C. dan Dodge, S. 2017. Muslim Brotherhood Is at the Heart of Gulf Standoff With Qatar". <https://www.bloomberg.com/graphics/2017-muslim-brotherhood/>
- Amstrong, K. 2014. "Wahhabism to ISIS: how Saudi Arabia exported the main source of global terrorism". <https://www.newstatesman.com/world-affairs/2014/11/wahhabism-isis-how-saudi-arabia-exported-main-source-global-terrorism>
- Bahgat, G. Saudi Arabia And The War on Terrorism. Arab Studies Quarterly. 26 (1). ProQuest.
- BBC. 2014. "Saudi Arabia declares Muslim Brotherhood 'terrorist group'". <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-26487092>
- Clinton, W. David. (1994). The Two Faces of National Interest. Louisiana: Louisiana State University Press.
- Council on Foreign Relations. 2018. "U.S.-Saudi Arabia Relations". <https://www.cfr.org/backgrounder/us-saudi-arabia-relations>
- Dawn. 2009. US created Taliban and abandoned Pakistan, says Hillary. [video: <https://www.youtube.com/watch?v=XY-BWScpdZw>]
- DeYoung, K. dan Sly, L. 2012. Syrian rebels get influx of arms with gulf neighbors' money, U.S. coordination. https://www.washingtonpost.com/world/national-security/syrian-rebels-get-influx-of-arms-with-gulf-neighbors-money-us-coordination/2012/05/15-/gIQAds2TSU_story.html?utm_term=.5cd442d98be8
- DeYoung, K. 2018. "Saudi prince denies Kushner is 'in his pocket'" https://www.washingtonpost.com/world/national-security/saudi-prince-denies-kushner-is-in-his-pocket/2018/03/22/701a9c9e-2e-22-11e8-8688-e053ba58f1e4_story.html?noredirect=on&utm_term=.cec15543c195
- European Parliament. 2013. The Involvement of Salafism/Wahhabism in The Support and Supply Of Arms To Rebel Groups Around The World. [http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes-join/2013/457137/EXPO-AFET_ET\(2013\)457137_EN.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes-join/2013/457137/EXPO-AFET_ET(2013)457137_EN.pdf)

- Gall, C. 2016. Saudis Bankroll Taliban, Even as King Officially Supports Afghan Government. <https://www.nytimes.com/2016/12/06/world/asia/saudi-arabia-afghanistan.html>
- Gause. 2004. Saudi Arabia and WoT dalam Garfinkle (ed) Practical Guide to Winning the War on Terrorism. California: Hoover Institution Press.
- Gearon, E. (2016). Turning Points in Middle Eastern History. Virginia: The Great Courses
- Hallinan, C. 2015. The Saudis are stumbling. <https://www.post-gazette.com/opinion/Op-Ed/2015/11/22/The-Saudis-are-stumbling-and-might-take-the-Middle-East-down-with-them/stories/201511220134>
- Hegghammer, T. dan Lacroix, S. 2007. Rejectionist Islamism In Saudi Arabia: The Story Of Juhayman Al-'Utaybi Revisited. International Journal of Middle East Studies. Vol. 39 (1),pp. 103-122. <https://doi.org/10.1017/S0020743807232556>
- Henderson, S. (1995). After King Fahd: Succession In Saudi Arabia. The Washington Institute for Near East Policy: Policy Papers Number 37.
- Ibnu Taimiyah (Syaiikhul Islam). 2007. Majmu'atui Fatawa. Edisi Terjemahan oleh Syaikhu, A. Darul Haq: Jakarta.
- Irish Times. 2017. "Saudi Arabia largest funder of extremism in UK, report finds". <https://www.irishtimes.com/news/world/uk/saudi-arabia-largest-funder-of-extremism-in-uk-report-finds-1.3144020>
- Neack, Laura. 2008. The New Foreign Policy: Power Seeking in a Globalized Era. Plymouth: Rowman & Littlefield Publishers, Inc.
- Rosenau, J. and Thompson, K. 1976. World Politic, An Introduction. New York: Free Press
- Saudi Arabia Foreign Ministry. 2017. White Paper: Saudi Arabia and Counterterrorism. <http://ksamissioneu.net/wp-content/uploads/2017/04/White-Paper-Counterterrorism-April2017.pdf>
- Shane, S. 2016. Saudis and Extremism: 'Both the Arsonists and the Firefighters' <https://www.nytimes.com/2016/08/26/world/middle-east/saudi-arabia-islam.html?rref=collection%2Fbyline%2Fscott-shane&action=click&contentCollection=undefined®ion=stream&module=inline&version=latest&contentPlacement=8&pgtype=collection>
- Smitha, F. 2001. "Ibn Saud, the Wahhabi and Oil, to 1945"-<http://www.fsmitha.com/h2/ch17arab.html>, diakses 5 Juni 2018.

- Stenslie, S. 2018. The End of Elite Unity and the Stability of Saudi Arabia. *The Washington Quarterly* 41 (1) pp. 61–82. <https://doi.org/10.1080/0163660X.2018.1445360>
- Taylor, A. 2014. Behind Biden's gaffe lie real concerns about allies' role in rise of the Islamic State <https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2014/10/06/behind-bidens-gaffe-some-legitimate-concerns-about-americas-middle-east-allies/?utmterm=.63-1106bd7242>
- Wagemakers, J. (2012). The Enduring Legacy Of The Second Saudi State: Quietist And Radical Wahhabi Contestations of Al-Wala Wa-L-Bara. Cambridge University Press: *International Journal of Middle East Studies*, 44, 93-110.
- Wendt, A. (1992). Anarchy is what states make of it: the social construction of power politics *International Organization* 46(2) hal. 391–426.
- Wikileaks. 2009. Terrorist Finance: Action Request For Senior Level Engagement On Terrorism Finance. https://wikileaks.org/plusd/cables/09STATE131801_a.html
- Wynbrandt, J. 2004. *A Brief History of Saudi Arabia*. New York: Facts On File, Inc.